

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan fiskal merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Disisi lain, stimulus fiskal sebagai kebijakan *counter cyclical* untuk mengembalikan kestabilan perekonomian yang sedang mengalami resesi/krisis. Penggunaan kebijakan fiskal didasari oleh kemampuan instrument kebijakan fiskal dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian, baik untuk mendorong peningkatan output perekonomian maupun untuk meningkatkan kesejahteraan (Wardhana dan Hartono, 2012).

Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal ekspansif sebagai peningkatan subsidi pemerintah. Dengan kenaikan subsidi pemerintah menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat, sehingga mampu mendorong naiknya tingkat investasi (Romer, 2001). Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah berupa pajak. Dalam keadaan krisis dan kelesuan sektor riil, sumber dana yang diperoleh dari pajak masih kurang, pengambilan utang yang terlalu besar akan mendorong peningkatan biaya bunga dan beban utang dimasa depan (Ma'ruf, 2008). Secara umum kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia sebagai negara berkembang adalah kebijakan yang ekspansif dengan menggunakan instrumen anggaran defisit (Abimanyu, 2011).

Perbedaan dampak ekonomi yang ada pada kebijakan fiskal masih menjadi perdebatan diantara para peneliti. Kelompok pertama berpendapat kebijakan fiskal dalam pemotongan pajak yang didanai oleh utang dapat meningkatkan pengeluaran konsumen dan mengurangi tabungan nasional. Peningkatan pengeluaran konsumen menyebabkan permintaan agregat lebih besar dan pendapatan lebih tinggi dalam jangka pendek, akibatnya persediaan modal lebih kecil dan pendapatan lebih rendah dalam jangka panjang. Kelompok kedua adalah pandangan Ricardian, pemotongan pajak yang didanai oleh utang tidak mendorong pengeluaran konsumen karena sumber daya konsumen secara menyeluruh tidak meningkat. Implikasinya, utang pemerintah saat ini dianggap sama dengan pendapatan pajak di masa akan datang. Masyarakat yang

berpikir rasional, mengetahui pajak masa depan sama dengan pajak saat ini. Oleh karena itu, masyarakat dapat menabung untuk membayar pajak masa depan, sehingga pemotongan pajak memicu kontraksi fiskal saat ini dan tidak akan mempengaruhi konsumsi karena masyarakat telah memprediksi akan terjadi ekspansi fiskal dimasa depan (Swasono dan Martawardaya, 2015). Kemudian apabila kebijakan pemerintah tidak berhasil dalam meningkatkan pendapatan dalam membayar utang. Maka pemerintah segera mengambil kebijakan dengan cara menstabilkan rasio utang agar terhindar dari defisit fiskal. Untuk menstabilkan rasio utang terhadap PDB dengan menerapkan kenaikan tarif pajak, sehingga kenaikan pendapatan pajak membuat kebijakan fiskal berkelanjutan. Sama halnya dengan pendapat Barro (1974) bahwa pajak dan utang pemerintah memiliki efek yang sama dalam perekonomian dimana utang pemerintah cenderung meningkatkan pajak dimasa depan yang merupakan asumsi penyebab terjadinya efek *Ricardian Equivalen*.

Asumsi *Ricardian Equivalence* secara umum terjadi di negara maju, tetapi *Ricardian Equivalence* dapat terjadi pada negara berkembang, berdasarkan penelitian Giorgioni dan Holden (2003) *Ricardian Equivalence* terjadi pada negara berkembang karena negara tersebut memiliki utang yang tinggi. Temuan Giorgioni dan Holden menyimpulkan bahwa *Ricardian Equivalence* terjadi pada 10 negara berkembang yaitu Burundi, El Salvador, Ethiopia, Honduras, India, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka dan Zimbabwe. Kemudian Ningrum (2019) menyatakan bahwa utang luar negeri yang dilakukan pemerintah dalam jangka panjang akan berdampak netral terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia apabila pembiayaan utang luar negeri digunakan untuk mendanai Investasi yang produktif untuk perekonomian, sesuai dengan pandangan *Ricardian Equivalence*. Sejalan dengan Hakim (2006) membuktikan konsep *ricardian equivalence* bahwa utang luar negeri berpengaruh terhadap ekonomi makro di Indonesia sehingga kebijakan fiskal masih sangat berperan sebagai alat menstimulus pertumbuhan perekonomian nasional.

Pengelolaan kebijakan fiskal ekspansif yang baik akan berdampak pada perekonomian nasional maupun kesejahteraan suatu daerah. Dengan bukti empiris faktor kebijakan fiskal yaitu rasio utang nasional/PDB, rasio defisit anggaran pemerintah/PDB, rasio pendapatan pajak/PDB dan rasio pengeluaran pemerintah/PDB memiliki efek dalam keputusan fertilitas selama masa siklus bisnis (Zaid, 2013). Sejalan

dengan Karimi (1995) melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menurunkan jumlah anak dalam rumah tangga, menyebabkan anggaran defisit pada masa sekarang, dan menjadikan beban pajak di masa depan. Dan untuk mengeksplorasi efek dari variabel ekonomi makro terhadap keputusan fertilitas dan menguji hasil empiris studi ini apakah bisa berlaku untuk negara maju lainnya. Dalam kebijakan ekspansif, rumah tangga merasa tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan permintaan anak selama periode utang atau defisit nasional meningkat dengan bentuk pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi atau pajak yang rendah, sehingga anak-anak mereka tidak perlu membayar utang mereka dimasa depan dalam jangka pendek.

Dengan kebijakan pemerintah daerah melalui peningkatan pengeluaran daerah dan penurunan pajak menyebabkan pendapatan rumah tangga meningkat. Partisipasi angkatan kerja wanita yang menikah mempengaruhi pendapatan bersih rumah tangga dan berdampak pada aturan fiskal (Rosaria, 2013). Pemerintah perlu melakukan peningkatan subsidi perawatan anak melalui pajak lump sum, meningkatkan tenaga kerja wanita melalui pendidikan tinggi, akan menyebabkan pengurangan dalam biaya fiskal seperti pengeluaran pemerintah (Haan, 2009; Fanti, 2004).

Di negara Jepang dan Eropa melakukan simulasi menurunkan fertilitas melalui pengeluaran pemerintah khusus untuk anak, melebihi biaya fiskal jangka panjang dengan cara kenaikan tarif pajak, tetapi sistem fiskal sangat berbeda di seluruh negara (Doi, 2011; Fehr, 2008; Guest and McDonald, 2000). Becker (1960) berpendapat dengan meningkatkan pendapatan berarti mengarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas anak, meskipun elastisitas kuantitas anak lebih kecil dibandingkan elastisitas kualitas anak. Sama halnya Mincer (1963), Becker dan Lewis (1973) menunjukkan bagaimana fertilitas dipengaruhi dalam pendapatan pria dan wanita. Dengan menurunnya pendapatan laki-laki mengarah ke permintaan yang lebih rendah untuk memiliki anak (efek pendapatan) sementara pendapatan perempuan menurun sehingga memiliki efek ambigu yang disebabkan efek pendapatan bertentangan dengan efek substitusi dalam permintaan anak.

Literatur sebelumnya meneliti efek fertilitas pada aktivitas ekonomi yaitu pada pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja wanita. Galor dan Weiln (1996) menyajikan model umpan balik positif dari fertilitas rendah ke output per kapita lebih

tinggi, upah perempuan relatif lebih tinggi dan tingkat partisipasi perempuan relatif lebih tinggi dalam angkatan kerja sehingga fertilitas menjadi rendah. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan efek umpan balik antara kegiatan ekonomi dan fertilitas. Jones (2011) menemukan kemampuan teori fertilitas menjelaskan bahwa hubungan fertilitas dan pendapatan tidak memiliki hubungan yang kuat. Beberapa studi empiris menyatakan negara yang memiliki produk domestik bruto tinggi maka fertilitasnya rendah dan sebaliknya produk domestik bruto rendah maka fertilitasnya tinggi, berbeda untuk beberapa kelompok negara diseluruh dunia disebabkan oleh aktivitas ekonominya (Mankiw, 1992; Hall dan Jones, 1999; Palivos, 1995; Jones dan Tertilt, 2006; Cervellati, 2016).

Perekonomian yang rendah bisa disebabkan oleh rasio ketergantungan, karena penduduk usia non produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif dan berdampak terhadap defisit fiskal. Kemudian ketidakseimbangan jumlah penduduk wanita dan laki-laki akan berakibat pada penurunan fertilitas (Rajagukguk, 2010). Sejalan dengan (Ashraf, 2013) pengurangan fertilitas sebagai faktor penting dalam kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina akibat ledakan jumlah penduduk, karena wanita harus menghabiskan usia produktifnya untuk mengandung, melahirkan dan merawat bayi yang menyebabkan kesulitan menghasilkan output ekonomi. Penduduk non produktif cenderung memiliki pengeluaran lebih besar untuk masalah kesehatan, sehingga pengeluaran semakin membengkak dan menyebabkan defisit fiskal yang serius bagi negara. Di negara Cina berhasil menggunakan kebijakan *one child policy* dengan menurunkan fertilitas di Cina secara terus menerus, tentunya akan semakin mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk usia tua di Cina. (Zhao, 2011; Campbell, 2007; Fyustiazari, 2014; Yang dan Wang, 2011; Feng, 2005).

Berbeda dengan Blackorby (2005), menilai dampak ekonomi dari kebijakan satu anak bukan merupakan dampak kesejahteraan. Keluarga dapat memiliki anak tambahan, karena anak dapat meningkatkan utilitas orang tua, bahkan jika itu dapat menurunkan pendapatan per kapita dan keadaan ekonomi. Sehingga keputusan memiliki anak tergantung pada kondisi ekonomi pasangan rumah tangga (Benoit, 2015; Oguro, 2011). Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan jumlah penduduk akan mencapai lebih dari 9,2 miliar pada tahun 2050. Penduduk dunia bertambah lebih 75% orang

setiap tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk neto ini 97% terjadi dinegara berkembang. Masalah pertumbuhan penduduk bukan sekedar persoalan angka tetapi berkaitan dengan masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia (Todaro, 2006).

Hasil laporan *state of world populatin (2018)*, negara maju di Asia, Eropa dan Amerika Utara, memiliki fertilitas rendah dalam waktu yang lama. Mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi serta mewujudkan hak-hak perempuan seperti hak reproduksi dasar. Untuk meringkan kekhawatiran pemerintah tentang populasi menua maka dilakukan pemotongan layanan kesehatan untuk mengurangi fertilitas (C, 2011). Indonesia harus mampu mendesain sistem anggaran dengan baik ditahun 2020, karena jumlah populasi tahun 2000 di Indonesia diusia 55 tahun hingga 60 tahun sebanyak 10 dan 7 persen (BKKBN, 2018). Sehingga pemerintah harus dapat mengatasi masalah anggaran akibat meledaknya pengeluaran pemerintah karena kepadatan penduduk. Pentingnya pengelolaan kebijakan fiskal yang tepat dengan tujuan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Kemudian peneliti melihat perkembangan kebijakan fiskal daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia sesuai dengan masing-masing instrument kebijakan fiskal daerah.

Perkembangan pengeluaran daerah masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia mengalami kenaikan tetapi kenaikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan daerah, sehingga pemerintah kabupaten dan kota untuk menutupi pengeluaran daerah akibat defisit pendapatan maka dengan cara melakukan utang antar daerah di kabupaten dan kota. Perkembangan kebijakan fiskal daerah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dapat dilihat pada lampiran pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan utang daerah. Anggaran defisit yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota akan menyebabkan utang daerah semakin membengkak sehingga berdampak pada keberlanjutan fiskal yang tidak baik. Pemerintah kabupaten dan kota harus cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit fiskal yang berkelanjutan serta pemerintah tidak boleh tergantung kepada pajak masa depan dan utang dalam menutupi defisit fiskal tersebut. Peneliti sebelumnya mengatakan perekonomian yang baik akibat dari rendahnya fertilitas daerah tersebut dan sebaliknya dengan perekonomian yang buruk akibat dari tingginya fertilitas daerah tersebut. Kebijakan fiskal baik di pemerintah kabupaten dan kota serta Indonesia selalu mengalami utang yang tinggi akibat pendapatan defisit dengan fertilitas yang

tinggi, sehingga pemerintah harus cepat mengatasinya karena akan berdampak pada perekonomian daerah dan nasional yang berkepanjangan.

Konsep ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia akan menerapkan *Long-Term Growth Projection*, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Australia. *Long-Term Growth Projection* merupakan proyeksi kebijakan fiskal dengan menggunakan pendekatan kerangka 3P (*population, Participation, and Productivity*). Indonesia akan mengembangkan proyeksi ekonomi di bidang demografi untuk menyusun rencana anggaran kebijakan fiskal dengan tepat. Dari prinsip *population* mencakup fertilitas, migrasi dan proyeksi penduduk, sehingga pemerintah dapat mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat (Purnomo, 2016). Kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.87 Tahun 2014 tentang sistem informasi keluarga untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Fertilitas merupakan jumlah anak yang lahir dalam keadaan hidup, untuk mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur (umur 15 – 49 tahun) menggunakan *total fertility rate* (TFR). Pemerintah Indonesia selalu menargetkan TFR berada pada angka 2,1 tetapi, hasil laporan sementara survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) di tahun 2017 telah mengeluarkan TFR nasional pada angka 2,4. Prof. Murtiningsih Adioetomo mengatakan dalam acara Forum Pakar dan Pemangku Kepentingan Bonus Demografi, bagaimana TFR dengan angka sebesar 2,1 dan dampaknya terhadap fiskal. Perkembangan TFR antar Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat dilihat dalam lampiran, pemerintah Kabupaten dan Kota yang memiliki nilai TFR 2,1 yang ditargetkan pemerintah pusat hanya 20% atau 88 Kabupaten dan Kota dan sisanya 80% atau 357 Kabupaten dan Kota yang memiliki nilai TFR diatas 2,1 sampai dengan 5,08 anak per 1000 wanita dari 445 Kabupaten dan Kota. Penyebab *Total Fertility Rate* di Indonesia belum tercapai disebabkan oleh masih banyaknya wilayah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia nilai TFR masih tinggi.

Selanjutnya perkembangan penduduk dan TFR di Indonesia terdapat perbedaan teori dan empiris yang menunjukkan ada masalah yang harus diteliti. Dengan melihat trend penduduk Indonesia selama 1977-2017 pada gambar 4.11 mengalami peningkatan yang drastis tetapi trend TFR di Indonesia selama 1977-2017 pada gambar 4.1 mengalami penurunan. Teori ricardian ekuivalen mengatakan apabila perkembangan penduduk semakin meningkat maka TFR akan meningkat, tetapi yang terjadi di Indonesia malah perkembangan berlawanan arah, ini menunjukkan terjadi masalah dalam perkembangan penduduk dan TFR. Sehingga peneliti ingin melihat penyebab masalah perkembangan penduduk dan TFR apakah dari faktor kebijakan fiskal, angka harapan hidup, inflasi dan pendidikan. Oleh sebab itu, salah satu untuk mencapai TFR tersebut dengan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien melalui kebijakan fiskal daerah, maka terbukti bahwa efek kebijakan fiskal dapat mempengaruhi dalam keputusan fertilitas.

Melalui kebijakan fiskal pemerintah melakukan peningkatan pengeluaran yang menyebabkan anggaran defisit karena pendapatan daerah tidak cukup menutupi pengeluaran pemerintah akibat tidak ada perubahan tarif pajak daerah. Perilaku rumah tangga yang bermoral atau bertanggung jawab akan mengurangi konsumsi dan dialihkan ke tabungan untuk diwariskan ke anak cucunya. Rumah tangga akan lebih memprioritaskan kualitas anak dari pada kuantitas anak. Karena dimasa depan pemerintah akan menaikkan tarif pajak untuk membayar utang pemerintah. Dengan sendirinya rumah tangga akan menurunkan permintaan anak, akibat kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan sosialisasi pengendalian jumlah anak, kasus ini apabila rumah tangga bersifat bertanggung jawab atau bermoral. Penelitian ini hanya difokuskan untuk melihat efek dari kebijakan fiskal terhadap fertilitas di Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan informasi tersebut, terlihat faktor kebijakan fiskal memiliki pengaruh terhadap fertilitas, namun pengaruh kebijakan ini berbeda antar satu negara dengan negara lain atau antar suatu daerah ke daerah lain. Kebijakan fiskal di daerah dan nasional diharapkan memberikan stimulus dalam keputusan fertilitas secara berkesinambungan dan berkualitas. Pengelolaan kebijakan fiskal yang tepat akan terhindar dari masalah ekonomi dalam jangka panjang dan mempengaruhi pengendalian jumlah anak sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Dari sisi lain, perekonomian

negara dalam keadaan meningkat sehingga fertilitas akan menurun dan sebaliknya. Akan tetapi, belum ada peneliti yang melihat bagaimana faktor-faktor kebijakan fiskal mempengaruhi fertilitas di negara berkembang. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis tertarik menguji teori ricardian ekuivalen dalam kebijakan fiskal terhadap fertilitas pada pemerintah kabupaten dan kota serta di Indonesia. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis disertasi dengan judul “ Kebijakan Fiskal dan Fertilitas di Indonesia”.

Fertilitas dalam penelitian ini menggunakan *Total Fertility Rate* (TFR). Kebijakan fiskal daerah seperti pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan utang daerah, dan variabel kontrol terdiri dari angka harapan hidup, pendidikan, penduduk dan inflasi pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia mempengaruhi fertilitas selama masa siklus.

B. Rumusan Masalah

Apakah teori ricardian ekuivalen berlaku secara empiris baik pada Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan melihat adanya pengaruh kebijakan fiskal dalam keputusan fertilitas?. Apakah teori ricardian ekuivalen berlaku secara empiris baik pada Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan melihat adanya pengaruh kebijakan fiskal, angka harapan hidup, pendidikan, penduduk dan inflasi dalam keputusan fertilitas ?. Apakah teori ricardian ekuivalen berlaku secara empiris di Indonesia dengan melihat adanya pengaruh kebijakan fiskal dalam keputusan fertilitas ?. Apakah teori ricardian ekuivalen berlaku secara empiris di Indonesia dengan melihat adanya pengaruh kebijakan fiskal, angka harapan hidup, pendidikan, penduduk dan inflasi dalam keputusan fertilitas ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, terlihat pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian akan seiring dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas. Dengan demikian, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji apakah teori ricardian ekuivalen berlaku secara empiris di Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan melihat adanya pengaruh kebijakan fiskal daerah dalam keputusan fertilitas.
2. Menguji apakah teori ricardian ekuivalen berlaku secara empiris di Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan melihat adanya pengaruh kebijakan fiskal daerah, angka harapan hidup, pendidikan, penduduk dan inflasi dalam keputusan fertilitas.
3. Menguji apakah teori ricardian ekuivalen berlaku secara empiris di Indonesia dengan melihat adanya pengaruh kebijakan fiskal dalam keputusan fertilitas.
4. Menguji apakah teori ricardian ekuivalen berlaku secara empiris di Indonesia dengan melihat adanya pengaruh kebijakan fiskal, angka harapan hidup, pendidikan, penduduk dan inflasi dalam keputusan fertilitas.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Kebijakan fiskal di Indonesia memberikan kewenangan pada pemerintah daerah berupa keleluasan untuk mengatur pendapatan dan pengeluarannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Hal tersebut didasari pada asumsi bahwa , pemerintah daerah lebih tahu dan lebih mengenali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Selain itu pemerintah daerah juga diasumsikan lebih bisa secara efisien dan efektivitas dalam membiayai pengeluarannya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, untuk tercapainya kesejahteraan masyarakatnya, karena mereka lebih dekat dengan rakyat (Akhmad, 2012). Penelitian ini fokus pada variabel kebijakan fiskal daerah meliputi pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan utang daerah. Variabel fertilitas adalah *total fertility rate* (TFR) dan variabel kontrol adalah angka harapan hidup, pendidikan, inflasi dan penduduk.

Sampel penelitian menggunakan 445 pemerintah kabupaten dan kota dari tahun 2007-2017 dengan menggunakan data panel, dan Indonesia dengan data *time series* dari tahun 1977-2017. Hasil pengumpulan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan WorldBank. Kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat efek kebijakan fiskal daerah dan nasional, angka harapan hidup, pendidikan, penduduk dan inflasi dalam keputusan fertilitas sehingga teori ricardian ekuivalen berlaku di 445 Pemerintah Kabupaten dan Kota serta di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi pengambil kebijakan terutama Pemerintah Kabupaten dan Kota, BKKBN, Kementerian Keuangan, agar dapat mengambil kebijakan fiskal yang tepat dalam menghadapi masalah fertilitas pada seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota, di Indonesia
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu ekonomi makro, ekonomi mikro dan ekonomi keuangan negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, terutama yang meneliti mengenai kebijakan fiskal, kebijakan makroekonomi dan fertilitas pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia dan negara berkembang lainnya

